Nama: Andri Firman Saputra

Kelas: 02TPLP023

NIM : 201011402125

Tugas: Komputer & Masyarakat – Pertemuan 3

 Jelaskan yang dimaksud dengan masyarakat Harold Laski?
Masyarakat adalah suatu kelompok manusia yang hidup dan bekerjasama untuk mencapai terkabulnya keinginan-keinginan mereka bersama.

- 2. Jelaskan syarat terbentuknya masyarakat?
 - 1. terdapat sekumpulan orang
 - 2. menetap di suatu wilayah
 - 3. menghasilkan sebuah kebudayaan
 - 4. memiliki nilai dan norma
 - 5. merupakan satu kesatuan/mempunyai rasa kebersamaan
 - 6. mempunyai tujuan dan kepentingan Bersama
- 3. Menurut anda mengapa terjadi isu sosial ditengah masyarakat dengan adanya komputer?

Masalah sosial adalah suatu ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat, yang membahayakan kehidupan kelompok sosial. Jika terjadi bentrokan antara unsur- unsur yang ada dapat menimbulkan gangguan hubungan sosial seperti kegoyahan dalam kehidupan kelompok atau masyarakat. Masalah sosial muncul akibat terjadinya perbedaan yang mencolok antara nilai dalam masyarakat dengan realita yang ada. Isu-isu sosial dapat terjadi di dalam bidang-bidang seperti:

- 1. Bidang informasi dan komunikasi
- 2. Bidang ekonomi dan industri
- 3. Bidang sosial dan budaya
- 4. Bidang pendidikan
- 5. Bidang politik
- 4. Buatlah sebuah makalah yang menggambarkan pemanfaatan komputer dan masyarakat.

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Konsep kota pintar alias smart city semakin banyak diterapkan di negaranegara di dunia. Konsep ini membuat kota terlihat lebih teratur, indah dan memiliki manajemen yang praktis. Demikian halnya juga kota Jakarta yang sudah mulai menerapkannya di tahun 2016. Memudahkan masyarakat menikmati fasilitas di kota tersebut adalah tujuan dari smart city. Menciptakan kota dan masyarakat yang cerdas adalah goal dari konsep yang sudah lebih dahulu diterapkan di negara-negara maju ini. DKI Jakarta adalah salah satu kota yang telah menerapkan konsep ini. Menerapkan smart city dilakukan Jakarta seolah tak mau kalah dengan beberapa kota lainnya di Indonesia yang juga telah menerapkan konsep ini. Misalnya saja seperti Bandung, Surabaya, Bogor ataupun Depok. Kebijakan smart city Jakarta didukung oleh enam pilar, di antaranya Smart Governance, Smart Economy, Smart Mobility, Smart People, Smart Environment dan Smart Living. Hal ini membuat pemerintah Jakarta juga melakukan persiapan untuk menciptakan masyarakat yang juga smart. Jakarta mulai mengubah sisi-sisi "gelap" kota menjadi lebih nyaman dan "terang". Transparansi pekerjaan petugas provinsi menjadi lebih nyata saat konsep ini diterapkan. Setiap hasil pekerjaan Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD) yang ada di lingkungan Pemprov DKI pun mulai dibeberkan kepada publik. Keseluruhannya dapat dinikmati masyarakat dengan mengakses situs bertajuk smartcity.jakarta.go.id. Sajian pelaporan disajikan dalam bentuk geospasial sehingga memudahkan pembaca dalam melihat bentuk kinerja pekerja pemerintah provinsi. Situs resmi ini juga menyajikan kondisi lalu lintas di sejumlah ruas jalanan ibu kota. Hanya dengan melakukan klik maka seluruh informasi kondisi lalu lintas dapat diakses dengan mudah. Bahkan masyarakat dapat dengan mudah melaporkan berbagai pantauan pandangan mata yang terjadi di sekitarannya. Hingga kini pihak Pemprov DKI Jakarta menggunakan aplikasi Qlue dan CROP. Keduanya memudahkan masyarakat untuk melakukan pengaduan yang dapat segera ditindak oleh pihak Pemprov DKI Jakarta. Dengan jumlah penduduk yang besar dan beragam, terhubung

dengan daerah-daerah pendukung dan menjadi pusat urbanisasi serta pusat pertumbuhan ekonomi, Jakarta sudah seharusnya melakukan perubahan untuk dapat mengelola aset mereka dengan lebih baik dan mampu menghadapi kompleksitas kota metropolitan lainnya secara lebih baik, sigap, efektif dan efisien.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dari makalah ini adalah:

- 1. Bagaimana TI menjadi model bisnis.
- 2. Bagaimana DKI Jakarta membentuk kota cerdas.
- 3. Bagaimana mengatasi masalah dengan Jakarta Smart City (JSC)

1.3 Tujuan

Tujuan dalam penulisan ini antara lain:

- 1. Untuk mengetahui pemanfaatan komputer di masyarakat.
- 2. Untuk mengetahui pengelolaan Jakarta Smart City.
- 3. Untuk mengetahui solusi dari masalah di Jakarta.

2. PEMBAHASAN

2.1 Kaitan Model Bisnis dengan Kasus Bisnis TI

Ketika kita akan menggunakan infrastruktur teknologi informasi dalam urusan bisnis, maka pertama-tama kita harus memahami dan menganalisa terlebih dahulu model bisnis dari organisasi. Model bisnis sendiri merupakan cara yang digunakan oleh organisasi dalam instansi atau perusahaan untuk berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya yang terdiri dari komponen strategi, kapabilitas dan nilai atau value. Dengan adanya model bisnis, organisasi memiliki landasan yang kuat dalam mengambil keputusan penting dalam perusahaan termasuk dalam membuat perencana bisnis

2.1.1 Analisa Strategi

Strategi merupakan seperangkat kegiatan yang membuat organisasi kita berbeda dengan organisasi lain dan berfungsi untuk menyampaikan nilai-nilai secara unik. Yang termasuk dalam analisa strategi 1. analisa konteks bisnis 2. analisa pasar dan posisi produk 3. analisa kompetitor dan substitusi 4. analisa jaringan bisnis[2] . Pada intinya, analisa strategi merupakan analisa akan peluang dan tantangan yang harus dihadapi oleh organisasi. Untuk DKI Jakarta sendiri, kesempatan yang sangat menonjol yaitu DKI Jakarta merupakan instansi pemerintahan yang tidak memiliki "rival" dan mempunyai kesempatan untuk mengakses serta memperoleh semua data dan bekerja sama dengan seluruh instansi terkait, baik sesama instansi pemerintah maupun swasta. Satu-satunya fokus dari DKI Jakarta yaitu memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada warga dan mengatasi atau meminimalisasi masalah yang ada saat ini. Perlu diingat bahwa DKI Jakarta merupakan kota metropolitan yang memiliki jumlah penduduk besar, daerah yang luas dan penduduknya yang terbiasa dengan segala hal yang serba cepat. Jika Pemprov DKI Jakarta tidak mengikuti perkembangan jaman, maka kekacauan akan terjadi karena tidak ada keselarasan antara kinerja pemerintah dengan perkembangan atau perubahan yang terjadi. Oleh karena itu, Pemprov DKI memiliki strategi untuk menerapkan konsep smart city di wilayahnya demi tercapainya Jakarta yang lebih baik.

2.1.2 Analisa Kebutuhan Sumber Daya dan Kapabilitas

Pada bagian ini, analisa kebutuhan sumber daya dan kapabilitas bertujuan untuk mengetahui hal-hal apa saja yang harus diselaraskan demi kelancaran organisasi dalam menjalankan strategi yang telah ditentukan. Berikut merupakan beberapa langkah dalam menganalisa kebutuhan sumber daya dan kapabilitas tersebut:

- 1. Analisa proses
- 2. Evaluasi SDM dan rekanan
- 3. Menilai bentuk dan kultur organisasi
- 4. Evaluasi kepemimpinan dan sistem penguasaan

Dengan berlangsungnya pemilihan gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta pada tahun 2012 lalu, maka terjadilah perubahan struktur organisasi dan nilai-nilai di Provinsi DKI Jakarta yang pada akhirnya dipimpin oleh Joko Widodo dan Basuki Tjahaya Purnama pada saat itu. Perubahan tersebut mengubah pula kapabilitas dari DKI Jakarta. Kedua pemimpin DKI Jakarta tersebut menginginkan pemerintahan yang lebih bersih, transparan dan melibatkan peran sera warga di dalamnya. Semangat revolusi mental yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo serta Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaya Purnama berimbas pada perubahan tatanan pemerintahan DKI Jakarta dan kegiatan keseharian yang berjalan di provinsi tersebut.

Berdasarkan dua faktor di atas—strategi dan kapabilitas—maka bentuk perencanaan penerapan infrastruktur teknologi informasi di Pemprov DKI Jakarta harus mampu memenuhi beberapa faktor berikut;

- 1. Memberikan pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat
- 2. Dapat menangani permasalahan yang terjadi di DKI Jakarta
- 3. Memberi data yang informatif
- 4. Memungkinkan transparansi dalam pemerintahan
- 5. Dapat melibatkan masyarakat secara aktif di dalamnya.

Namun begitu, tidak lupa pula bahwa penerapan infrastruktur TI harus mampu memberikan dampak positif lain seperti

- 1. Penghematan biaya
- 2. Meningkatkan pendapatan
- 3. Efisiensi aset
- 4. Menciptakan keuntungan berkelanjutan.

2.2 DKI Jakarta sebagai Kota Cerdas

Jakarta Smart City (JSC) adalah penerapan konsep kota cerdas dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk untuk mengetahui, memahami, dan mengendalikan berbagai sumber daya di dalam kota dengan lebih efektif-efisien demi memaksimalkan pelayanan publik, memberikan solusi penyelesaian masalah, mendukung pembangunan berkelanjutan dan mewujudkan pelayanan masyarakat yang lebih baik. Konsep smart city juga akan meningkatkan partisipasi masyarakat dan pemerintah dalam menafaatkan data, aplikasi, memberikan masukan maupun kritikan secara mudah. Pada intinya, smart city yang dimaksud oleh DKI Jakarta adalah membuat Jakarta sebagai kota atau provinsi yang lebih baik, informatif, transparan dan kolaboratif dengan menggunakan bantuan teknologi informasi dan komunikasi. Pemanfaatan TIK dan dibangunnya Jakarta Smart City Lounge di sini tidak hanya berperan sebatas "command center" saja, melainkan mampu mengubah sistem pemerintahan dan dapat mewujudkan Jakarta Baru.

Jakarta Smart City sendiri merupakan suatu bagian yang berada di bawah Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan atau Diskominfomas dengan lima divisi yang terdapat di dalamnya, yaitu:

1) Divisi Lapangan (field)

Merupakan divisi yang turun tangan dan menangani masalah secara langsung di lapangan. Beberapa tugasnya yaitu sebagai berikut:

- Melakukan pengecekan lapangan terkait program utama DKI Jakarta serta program gubernur.
- Memantau Command Center
- Merespon pengaduan dalam kanal pengaduan DKI Jakarta
- Sosialisasi program unggulan Pemprov DKI Jakarta
- Input data dan pemutakhiran data pada aplikasi Jakarta.go.id

2) Divisi Data dan Analisis (data & analysis)

Memberikan insight dan informasi baru dalam pengambilan keputusan malalui hasil analisis data. Contoh hal yang dapat dilakukan oleh divisi ini misalnya yaitu melihat hubungan antara cuaca dengan behavior warga, "beberapa menit setelah hujan berhenti, halte Transjakarta akan dipenuhi oleh calon penumpang", dari situ dapat diambil keputusan bahwa Tranjakarta harus menyediakan armada bus yang cukup banyak segera setelah hujan reda agar tidak terjadi penumpukkan penumpang. Selain itu dengan adanya divisi ini dan Jakarta Smart City pada umumnya, pemerintah dapat mengambil keputusan dengan data yang mutakhir, tidak lagi menggunakan data dari tahun-tahun sebelumnya sebagai acuan.

3) Divisi Pengembangan (development)

Divisi ini merupakan divisi yang bertugas untuk melakukan pengembangan sistem dan aplikasi TI dalam lingkup Jakarta Smart City dengan tugas sebagai berikut: - Melakukan pengembangan website dan aplikasi. - Merancang dan membangun sistem jaringan infrastruktur TI.

4) Divisi Komunikasi (communication)

Merupakan divisi yang bertugas untuk melakukan sosialisasi konsep, informasi, dan kebijakan terkait Jakarta Smart City kepada berbagai pihak dalam format yang mudah dipahami dan penggunaan media yang tepat guna.

2.3 Permasalahan dan Solusi DKI Jakarta dengan JSC

2.3.1 Isu Utama Permasalahan DKI Jakarta

Hal-hal yang menjadi isu utama untuk diselesaikan oleh DKI Jakarta sebagai smart city adalah:

- 1) Pelaporan dan pengaduan masalah oleh masyarakat
- 2) Pungutan liar
- 3) Akses data publik
- 4) Transparansi anggaran
- 5) Transportasi dan fasilitas publik
- 6) Banjir

2.3.2 Solusi dari Jakarta Smart City

Dari masalah-masalah yang menjadi isu utama tersebut, Pemprov DKI Jakarta telah menerapkan berbagai solusi, diantaranya yaitu Kartu Jakarta Pintar (KJP) untuk memberikan jaminan pendidikkan 12 tahun; Kartu Jakarta Sehat (KJS) sebagai jaminan fasilitas kesehatan; Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) sebagai fasilitas bermain anak-anak demi terwujudnya Jakarta sebagai kota yang layak huni; Penangan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) yang siap menangani masalah yang dilaporkan oleh warga seperti pengecatan ulang tembok akibat vandalisme, perbaikan jalan, membersihkan got yang mampat maupun masalah lainnya. Petugas PPSU sendiri terdiri dari 40 - 70 personil di setiap wilayahnya; pencegahan banjir; dan penyediaan transportasi publik yang murah dengan bus Transjakarta. Sedangkan dari segi sistem TIK, Pemprov DKI memiliki Jakarta Smart City Portal, Regional Development Planning Forum (Musrenbang), telepon pelaporan bencana 112, aplikasi Qlue, kawal anggaran dan Open Data. Selain itu Pemprov DKI Jakarta bekerjasama dengan LSM perlindungan wanita dan salah satu bagian PBB sedang merancang sistem untuk perlindungan untuk wanita dari tindakan kriminal dan kejahatan seksual.

BAB III

3. PENUTUP

3.1 KESIMPULAN

Pembangunan Jakarta Smart City telah sesuai dengan strategi dan kapabilitas yang dimiliki oleh Pemprov DKI Jakarta, yaitu memberikan pelayanan publik yang lebih baik dan menyelesaikan masalah yang ada serta mewujudkan pemerintahan yang transparan, partisipatif dan melibatkan warga secara aktif. Penerapan TI dalam JSC pun telah memberikan keuntungan yang berkelanjutan baik dari segi biaya, waktu maupun aset.